

PENATAAN TANAH ABANG MOMENTUM PERBAIKI TRANSPORTASI JAKARTA

Rabu, 17 Januari 2018 - Razanah Balqis

JAKARTA.KRJOGJA.com - Penataan kawasan Tanah Abang bisa dijadikan momentum oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membangun Jakarta yang lebih baik lagi. Upaya itu bisa dimulai dengan menertibkan transportasi dan menyediakan konektivitas antar moda serta pengaturan pedagang kaki lima (PKL).

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, masalah utama di Tanah Abang adalah penertiban transportasi. Sementara keberadaan PKL merupakan dampak dari masalah transportasi di pusat perbelanjaan di Ibu Kota tersebut.

"Konektivitas Tanah Abang ini dibenahi dulu, baru diperluas (ke wilayah lain). Dari mana itu (Tanah Abang) Explorer, terus ada bus jemput di mana, itu harus rerouting," ujar Agus Pambagio dalam diskusi masalah Transportasi Terkini Jakarta, di Jakarta Pusat, Selasa (16/01/2018) petang.

Agus melihat, sesungguhnya penertiban PKL yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta belakangan ini sebagai upaya pembenahan transportasi publik. PKL selama ini menempati ruang publik, khususnya trotoar sehingga memicu kemacetan yang makin parah.

Menurut Agus, transportasi di kawasan Tanah Abang saat ini tidak terhubung satu dengan lainnya. "Pemprov DKI Jakarta seharusnya membuat konektivitas antar moda transportasi, terutama bagi penumpang dari Commuter line," ujarnya.

Penumpang Commuter line yang setiap harinya memadati Stasiun Kereta Api Tanah Abang jumlahnya terus meningkat. Sementara transportasi penghubungnya bagi mereka tidak tersedia dengan cukup baik. "Kurangunya transportasi penunjang atau feeder menjadi masalah transportasi Jakarta saat ini," kata Agus Pambagio.

Agus berpendapat, seharusnya Gubernur DKI Anies Baswedan memikirkan bagaimana satu moda transportasi saling menyambung dan tidak tumpang tindih. Saat ini, moda angkutan umum utama tertumpuk di Dukuh Atas. Mulai dari Transjakarta, sampai MRT yang tengah dibangun, berada di sana. Tumpang tindih itu, Pemprov harus mulai bisa mengurainya," tegasnya.

Pengamat transportasi Unika Soegijoprnoto, Djoko Setijowarno mengatakan, untuk mendukung pembenahan Tanah Abang harus dimulai dengan angkot. "Pemprov DKI bisa mengajak para supir angkot untuk bergabung dan diubah sistem pengajiannya," kata dia.

Menurut Djoko, sudah saatnya Pemprov DKI mengubah pengelolaan angkot dari kendaraan kecil menjadi bis mini agar kapasitas angkutnya lebih besar. "Minimal mini bus, jangan perorangan. Kesannya buruk bagi Jakarta," ujarnya.

Selain itu, angkot dikelola secara profesional oleh badan hukum dan awak angkutannya digaji dengan lebih baik, bukan sistem setoran lagi. "Jika dilakukan perbaikan seperti itu banyak yang mau termasuk awak angkutan umum. Mereka juga tidak uga-ugalan di jalan karena mengejar setoran. Selain itu, jika dikelola badan hukum, juga bisa menerima subsidi," jelas Djoko. (Imd).